

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

“Battle of Seattle”¹ menjadi icon perjuangan bagi mereka yang merasa berada pada lingkaran *disadvantage groups* atau mereka dirugikan dalam panggung globalisasi. Melalui slogan “anti globalisasi”, gerakan ini mampu menggerakkan yang mampu menggerakkan ribuan manusia dari berbagai komunitas di penjuru dunia. Eksistensi kelompok anti globalisasi tidak diragukan lagi, hal ini terbukti dari berbagai demonstrasi yang ditengarai sebagai upaya protes kelompok tersebut terhadap pertemuan-pertemuan dunia dan berhasil mengagalkannya, seperti pada pertemuan puncak Uni Eropa di Seattle Amerika Serikat yang berakhir 11 September 2002 yang sekaligus merupakan tonggak awal gerakan anti globalisasi ini. Protes Seattle memang mengundang perhatian besar dari publik internasional, mengingat negeri paman Sam ini merupakan kiblat bagi mazhab ekonomi paling dominan di Abad ke 21 yakni, neoliberalisme. Tanpa diduga 50.000 sampai 70.000 orang menyesaki jalan Seattle AS menentang pertemuan antar menteri ekonomi negara-negara anggota *World Trade Organisation* (WTO) yang tengah bersidang di gedung *Seattle Convention Centre* tersebut.

Keberhasilan demonstrasi Seattle pun menciptakan kepercayaan kepercayaan diri yang luar biasa bagi kaum anti globalisasi. Selanjutnya

¹ Bello, Walden. *De-Globalisasi (Gagasan-Gagasan Ekonomi Dunia Baru)*. Pondok Edukasi, Yogyakarta. 2004. Hal.2

gerakan-gerakan yang lebih terorganisir dengan basis massa yang jauh lebih banyak dan beragam dikerahkan, walhasil, Kelompok G8 pun menuai aksi demonstrasi serupa. Dengan basis massa 200.000 orang yang datang dari Eropa dan seluruh dunia. Gerakan demonstrasi damai lain begitu marak terjadi setelahnya di berbagai penjuru dunia, baik di negara-negara dunia ketiga maupun di negara-negara pionir neoliberal itu sendiri. Agenda protes yang sama namun berbeda bentuk terjadi pula di Meksiko, tepatnya di selatan negara bagian Chihampas protes dalam bentuk yang lebih ekstrim terjadi yakni pemberontakan para petani yang menuntut pembabasan tanah mereka dari kalangan korporasi dunia. Di negara-negara maju, kaum pecinta alam, anggota serikat buruh, feminis, punk, aktivis HAM, wakil masyarakat adat, orang muda dan separuh baya, warga AS, Kanada dan Eropa, Amerika latin dan Asia melawan kebijakan neoliberal NAFTA yang dianggap tidak memihak kepada mereka. seperti yang dicatat oleh Louis Hernandez Navaro, dari koran harian radikal *La Jornada di Meksiko*.²

Fenomena protes globalisasi seperti ini memang bukan hal baru dalam kehidupan masyarakat internasional. Krisis Asia pada tahun 1998 hanyalah sebagian kecil dari bukti kegagalan globalisasi neoliberal. ketimpangan global dan persoalan kemakmuran yang menjadi pemicu klasik dalam pengambilan kebijakan ekonomi negara, ternyata tidak terpecahkan hanya dengan doktrin pasar bebas dan resep pemulihan ekonomi lembaga Bretton Woods. Sebuah laporan yang dilansir *United*

² Coen Husein Pontoh, *Globalisasi. (Dari Perdebatan Teori Menuju Gerakan Massa)*. C-Books. Jakarta. 2003. Hal.5

Nations Development program's 1997 dari *Human Development Report* menyebutkan sejak 1960, ekspor global telah bertambah dari 60 Miliar Dollar dan menjadi 6,5 triliun dollar (setelah dikurangi inflasi) atau bertumbuh sebesar empat kali lipat. Namun paradoks yang juga terjadi pada periode yang sama juga cukup mencengangkan, pembagian pendapatan global untuk 20 persen rakyat miskin diberbagai negara jatuh dari 2,3 persen menjadi 1,1 persen. Laporan lainnya juga menasir tidak kurang dari 1,3 juta rakyat dunia ketiga tidak memiliki akses terhadap air bersih, satu dari tujuh anak-anak SD keluar dari sekolah, 840 juta orang menderita kekurangan gizi dan diperkirakan 1,3 juta orang hidup dengan pendapatan kurang dari 1 dolar per hari. UNDP pada 1999, kembali mengeluarkan laporan tentang hasil observasi yang menilik globalisasi dan dampak-dampaknya, yakni, Dalam sepuluh tahun terakhir terjadi pemusatan kekayaan ditangan segelintir orang. Tiga terkaya didunia saat ini menguasai aset yang nilainya sama dengan milik 600 juta orang di 48 negara termiskin. Begitu juga laporan UNDP pada tahun 2000 sama sekali tidak menunjukkan adanya kemajuan distribusi kemakmuran, penciptaan tatanan dunia yang lebih adil dan damai.³ Dalam *The Case Against Global Economy* (2001), aktivis dan ilmuwan Kanada, Tony Clarke, menulis, dari 100 pemain ekonomi dunia, 52 di antaranya adalah korporasi multinasional dan transnasional (TNCs/MNCs). Sekitar 70 persen perdagangan global dikendalikan hanya oleh sekitar 500 perusahaan. Setengah dari seluruh investasi dunia

³ Ibid hal. 10

dimiliki sahamnya oleh satu persen TNCs dan 443 dari 500 perusahaan terkaya di dunia berlokasi di Eropa (158), AS (185), dan Jepang (100). Mereka inilah yang menjadi lokomotif sistem ekonomi neoliberal. TNCs bukanlah "makhluk" yang disukai. Sejarah gerakan rakyat lahir antara lain akibat penindasan hidup rakyat oleh praktik-praktik dari pabrik-pabrik milik TNCs yang beroperasi di suatu negara dengan dukungan pemerintah dan aparat keamanan setempat. Dalam Pengadilan Internasional mengenai HAM Buruh dalam Peoples Summit mengenai APEC di Vancouver, Kanada, November 1997, seorang peneliti muda dari Hongkong memberikan kesaksian mengenai terbakarnya pabrik mainan Zhili di Shenzhen yang menewaskan 87 pekerja dan melukai 47 lainnya pada tahun 1993. Pabrik yang memproduksi mainan "Chicco" itu tidak dilengkapi alat pemadam kebakaran dan tertutup. Dalam kesaksian itu disebutkan, tidak ada kompensasi bagi keluarga pekerja yang tewas. Yang luka bakar pun tidak mendapat pengobatan yang memadai

Hal ini terulang pada tahun 1994 di Zuhai, yang menewaskan 93 orang dan 49 lainnya mengalami luka bakar serius. Tahun 1995, di Shunda, 32 orang tewas. Sebagian besar adalah perempuan muda dari pedesaan. Di pabrik pemasok mainan McDonald di Zuhai pernah terjadi keracunan benzene. Tiga tewas. Tragedi serupa juga terjadi di banyak negara berkembang lainnya. Akuntabilitas dan tanggung jawab TNCs pun dipertanyakan. Namun korporasi-korporasi itu tak kalah cerdik. Mereka menggunakan strategi yang luar biasa canggih melalui iklan-

iklan layanan masyarakat dengan mendompleng isu apa saja yang sedang hangat, termasuk isu kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia. Mereka juga melakukan praktik-praktik memecah belah rakyat yang menentang operasi mereka.

Globalisasi sendiri sering digambarkan sebagai sebuah kondisi baru. Ketika seorang filosof Jeremy Bentham, sebagai sebuah perbandingan menyebut kata "internasional" di tahun 1780 yang dimaknai sebagai cerahnya bagi berkembangnya negara bangsa akan tetapi pengertian ini lebih jauh membrikan gambaran tentang perluasan transaksi kehidupan masyarakat yang mulai mengalami perkembangan kehidupan perdagangan dan hubungan sosial. Pada masa itu pula belum dikenal istilah "hubungan internasional", akan tetapi dua ratus tahun kemudian siapa nyana istilah ini menjadi begitu marak dibicarakan, begitu pula halnya kata "globalisasi" sebagai padanan kata internasionalisasi menjadi istilah yang begitu dikenal bahkan, menjadi simbol ucapan bagi mereka yang ingin disebut modern. Globalisasi memiliki sebutan lain seperti *quan qui hua* di China, *globalizzazione* dalam bahasa Italia, dan *jatyantharreekarunaya* dalam bahasa Sinhalese yang merujuk pada semua pengertian yang mengglobal.

Negara-negara dunia ketiga pada awalnya menyambut globalisasi dengan antusias. Lembaga-lembaga penyokong neoliberal seperti halnya G-8, lembaga-lembaga Bretton Woods yakni, IMF dan Bank Dunia dan World Trade Organisation (WTO) begitu gencar mempromosikan pentingnya globalisasi bagi peningkatan kesejahteraan

rakyat dan pembangunan ekonomi. Diplomasi bantuan pun gencar dilaksanakan, negara-negara dunia ketiga yang pada era 1980an menganggap ini adalah kesempatan besar guna mengajar ketertinggalan mereka. Negara-negara dunia ketiga yang umumnya berada di benua Asia, Afrika dan Amerika latin yang telah merubah kebijakan mereka sesuai anjuran neoliberal akan tetapi kondisi krisis yang semakin parah dan pembengkakan oleh utang baru ini justru semakin memperparah keterbelakangan yang melilit mereka. Di tingkatan domestik program subsidi kepada rakyat dihentikan sementara peningkatan daya saing dan lapangan kerja kurang diperhatikan. Arus neoliberal membawa anomali yakni eskalasi ekonomi elit yang begitu fantastis sedangkan pada aras bawah, rakyat semakin terbuang dari negeri sendiri dan seolah tidak memiliki pelindung dari serangan-serangan ekonomi politik yang dijalankan oleh kekuatan supranasional. Hal serupa juga terjadi di Indonesia peningkatan sektor finansial dan pasar bursa, jauh melampaui sektor riil yang lebih banyak menyentuh kesejahteraan rakyat. Akibatnya secara kuantitatif Indonesia dinilai mengalami kemajuan pesat, namun pengangguran dan kemiskinan masih marak terjadi.

Bagaimanapun neoliberal merupakan perwujudan dari kapitalisme lanjut. Paham ini memiliki hubungan erat dengan post fordisme yakni salah satu pilar penopang globalisasi dari sisi produksi yang telah merambah ke seluruh dunia yang memaksa negara manapun untuk berinteraksi secara terbuka dengan aktor-aktor ekonomi internasional agar mengenakan *golden stright jacket*. Dengan mengikuti

resep ini negara melepaskan tanggung jawab perlindungan terhadap rakyatnya dalam bidang ekonomi. Rakyat kerap menjadi korban-korban pertempuran ekonomi global yang bercirikan kerjasama (*cooperation*), kompetisi (*Competition*) bahkan hingga konflik (*conflict*).

Banyak dari kalangan baik negarawan, politisi dan intelektual kembali memikirkan bagaimana seharusnya rakyat diselamatkan. Pada dataran global, lahirlah sebuah konsensus rakyat dengan *back ground* yang bervariasi yang disebut *World Social Forum* untuk menggiring globalisasi agar meminimalisir imbas destruktif dan mengganti sifat eksploitatif yang telah menjadi karakter dari kapitalisme. Pada tingkatan domestik banyak organisasi-organisasi yang mencoba untuk berposisi terhadap dua kekuatan sekaligus yakni kekuatan ekonomi politik supranasional dan berposisi dengan pemerintah yang dianggap telah terjangkiti virus neoliberal. Akan tetapi format politik yang seperti apa yang seharusnya menjadi tolak ukur perekonomian dunia ketiga, masih menjadi pertanyaan sekaligus perdebatan diantara politikus dan kalangan globalisasi alternatif dunia.

Menilik perjalanan sejarah ekonomi politik internasional, negara kesejahteraan yang digagas oleh Jhon Maynard Keynes untuk mendampingi mode produksi yang dikenal dengan Fordisme yang pernah menjayakan kehidupan Amerika dan negara-negara Eropa, memberikan sebuah landasan historis akan kemampuan negara dalam menggabungkan prinsip kapitalisme dan tetap menjaga kerekatan sosial yang berangkat dari logika "kesejahteraan sosial", sehingga rakyat

terlindungi dari anarki fundamentalisme pasar⁴ yang bersemayam dalam globalisasi neoliberal. Sistem tersebut sering diistilahkan dengan "welfare state" atau yang biasa dikenal dengan negara kesejahteraan.

Dalam dunia yang telah mengalami transformasi ekonomi politik, welfare state disingkirkan karena tidak sesuai dengan logika *laissez faire*. Welfare state dihancurkan oleh para pemikir neoliberal seperti Frederik Von Hayek, Milton Friedman yang mempertahankan dan merekonstruksi pemikiran kaum konservatif kapitalis yang segera menjadi wacana sakral dan tersebar luas dalam ide dan kerja neoliberal yang menjadi antitesa dari keterlibatan negara untuk memberikan subsidi seperti sering digalakkan dalam sistem welfare state karena dalam anggapan mereka sistem seperti ini hanya akan dimanfaatkan oleh kaum pemalas dalam perlindungan negara dengan adanya jaminan sosial. Tidak sepatutnya untuk menutup mata terhadap kritikan yang dilayangkan pada sistem *welfare state*. Sistem ini memang seperti disinyalir oleh Anthony Giddens sering digunakan oleh kaum sosialis dalam upaya mencapai cita-cita mereka walaupun dengan sikap yang defensif terhadap perkembangan rezim neoliberal global yang umumnya bersikap menolak sikap intervensionis. Bagaimanapun dunia telah berubah. Harus ada tindakan reflektif yang diambil untuk merestrukturisasi kembali *welfare state* yang pernah ada dan membenahi paradoks yang ada didalam tubuh sistem ini.

⁴ Sebuah term yang dianggap lebih baik daripada *laissez faire* (Lihat; Soros, George. *Krisis Kapitalisme Global, Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya*. Terjemahan Didin Solahudin, CV Qalam, Yogyakarta. 2002. Hal. 158

Dalam sebuah penelitian oleh Edi Suharto, digambarkan bahwa negara yang ideal adalah negara *welfare state* seperti diterapkan oleh negara-negara skandinavia yang memiliki Pembangunan ekonomi yang seimbang dengan pembangunan sosial seperti Swedia (PE 26.652 dolar AS-PS 33,1%), Norwegia (PE 24,924 dolar AS-PS 28,7 %), Denmark (PE 25.150 dolar AS-PS 27,8 %) dan Finlandia (FE 27.527 dolar AS-PS 27,1%). Negara negara Eropa barat juga termasuk kategori ini.⁵ Welfare state ini umumnya telah mengalami pergeseran dari model Keynesian ke model Giddens yang mereformasi dan merekonstruksikannya kembali dalam bentuk yang lebih elegan dan sesuai dengan kondisi dunia yang telah berubah.

Sekat ideologi sering kali menjadikan dunia seolah-olah menutup mata terhadap kemampuan sistem negara kesejahteraan. Yang harus diingat adalah bukan kanan ataupun kiri, namun, bagaimana negara-negara di dunia mampu memenuhi kesejahteraan rakyatnya dengan menekankan *justice for all* dan menyeimbangkan kepentingan komunitas tanpa harus kehilangan eksistensi individu.. Negara harus mampu menentukan prinsip-prinsip politik kenegaraan di era neoliberal yang bagaimana pun merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi dengan segala kekurangan dan kelebihanannya. Dengan menduplikasi model negara-negara dunia pertama dan mengkontekstualisasikan dengan kemampuan sumberdaya nasionalnya ada sebuah keniscayaan

⁵ www.policy.hu/suharto

perbaiki kondisi kesejahteraan rakyat di dunia ketiga melalui welfare state baru ini.

B. POKOK PERMASALAHAN

Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah; Bagaimanakah mewujudkan sistem pemerintahan dan kebijakan yang strategis bagi dunia ketiga di era neoliberal?

C. KERANGKA TEORI

1. Politik Jalan Ketiga, Anthony Giddens

Konsepsi jalan ketiga secara komprehensif diungkapkan oleh Giddens yang meliputi enam agenda besar, yaitu :

1. Menerima logika "1989" dan setelahnya, ketika kiri dan kanan masih demikian bernilai dalam politik kontemporer namun ada banyak persoalan yang tidak mampu lagi dijelaskan dengan perspektif oposisi biner. Pendekatan yang baru diperlukan untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada tersebut. Semisal isu-isu lingkungan, keluarga dan gender adalah beberapa contohnya. Politik jalan ketiga menghendaki dikonstruksikannya agenda politik radikal.
2. Menyatakan bahwa tiga wilayah kunci; pemerintah, ekonomi dan komunitas masyarakat sipil semuanya perlu dibatasi kepada kepentingan solidaritas sosial. Rumusan ini secara langsung merupakan kritik sekaligus jalan keluar atas otoritarianisme pasar yang merupakan kelemahan dari sistem neoliberalisme dan sebagai

akibatnya negara ketiga hanya menjadi boneka yang digerakan oleh kuasa pasar untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui keamanan agar kepemilikan privat bisa diakui disisi lain masyarakat diposisikan sebagai objek dari produk-produk neoliberalisme. Kondisi yang lebih memprihatinkan Masyarakat khususnya didunia ketiga hanya menjadi korban-korban praktek otoritarianisme ini sehingga kehidupan mereka berakhir dengan kemiskinan dan ketertindasan.

3. Mengklaim hendak mengkonstruksi suatu kontrak sosial baru, dengan didasarkan semboyan "tidak ada hak tanpa tanggung jawab". Dalam tata dunia baru yang didominasi oleh globalisasi neoliberal negara akan sangat terbebani jika perilaku proteksionisme terhadap rakyat secara berlebihan tetap menjadi acuan. Bantuan-bantuan tunai yang banyak hanya akan menciptakan sebuah budaya ketergantungan masyarakat menjadi hasil dari kebijakannya. Hendaknya bantuan yang positif berupa stimulus untuk kemandirian dan penciptaan karakter progresif menjadikannya sebagai skala prioritas. Apalagi dalam masyarakat didunia ketiga yang umumnya seperti disinyalir oleh Max Weber masih memiliki kekurangan dalam mencapai kemajuan yang dikenal dengan "*Need for Achievement*".
4. Dalam wilayah ekonomi, Ingin mengembangkan kebijakan *suply side* secara komprehensif, yang berusaha merekonsiliasikan mekanisme pertumbuhan ekonomi dengan reformasi struktural

negara kesejahteraan. Dalam ekonomi informasi baru kapital manusia dan sosial menjadi hal pokok menjadi hal pokok bagi kesuksesan ekonomi. Pengembangan bentuk-bentuk kapital tersebut menuntut investasi sosial yang luas—dalam pendidikan, komunikasi dan infrastruktur . Prinsip ' kapan saja dimungkinkan berinvestasi dalam kapital manusia' diterapkan secara sama terhadap negara kesejahteraan- yang perlu direkonstruksi menjadi negara investasi sosial' (*social investment state*).

5. Berusaha mengembangkan masyarakat yang beragam (*Diversified society*) dengan didasarkan pada prinsip egalitarianisme. Fakta keanekaragaman manusia dan sosial tidak dapat terelakan. Golongan, suku, keterampilan kerja, keberuntungan dan kepemilikan pribadi tidak bisa disamaratakan dengan semena-mena. Konstruksi egalitarianisme dinamis bisa menjadi alternatif pemecahan masalah atas semakin timpangnya kehidupan sosial dinegara ketiga khususnya. Alat analisis sebagai dasar pertimbangan untuk merumuskan formasi kebijakan bisa mempergunakan pendekatan eksklusi dan inklusi. Dengan pola itu diharapkan usaha menekan ketidaksamaan atau kesenjangan yang lebar bisa diantisipasi.
6. Menerima globalisasi secara serius. Sejarah dunia telah mencapai titik peradaban yang dikenal dengan globalisasi. Proses globalisasi yang oleh para pengkritiknya sering hanya dilihat dari perspektif ekonomi saja yaitu mengglobalnya modal transnasional dan multinasional oleh laju kapitalisme yang tidak menguntungkan atau

bahkan hanya menjadi ancaman. Namun demikian memundurkan sejarah juga bukan merupakan sebuah alternatif yang realistis. Dilain pihak bagi kaum neoliberalisme globalisasi merupakan sebuah kesempatan yang memberikan kebebasan individu untuk mengembangkan potensi mereka dan kompetisi terbuka lebar.

Kegagalan sebagian negara dunia ketiga menjalani program-program neoliberal demi mencapai kemajuannya memberikan deligitimasi bagi keberlangsungan neoliberalisme dan memberi kontribusi bagi kegagalan sistem ini. Globalisasi dianggap sebagai akar dari merebaknya kemiskinan dan ketidakadilan struktural serta rusaknya hubungan sosial yang telah tergantikan dengan nilai "pasar". Jalan ketiga menanggapinya bahwa globalisasi merupakan sebuah tantangan yang mesti kita hadapi, namun kita tidak bisa serta merta membuka diri bagi pertarungan pasar yang bebas namun harus mempersiapkan diri dengan cerdas dan matang sehingga keuntungan-keuntungan akan mampu diperoleh dengan optimal dan meminimalkan "korban-korban" pasar globalisasi.

D. HIPOTESA

Argumen dasar skripsi ini adalah menjadikan welfare state sebagai konsep dasar politik dunia ketiga akan tetapi setelah melalui restrukturisasi sistemik dan disesuaikan dengan kondisi dunia ketiga. Dari hasil uraian diatas maka dapat ditarik sebuah dugaan sementara terhadap permasalahan yang diangkat. "*Welfare State*" dapat

diwujudkan di dunia ketiga dengan mereformasinya menjadi *social investment state* dan masyarakat kesejahteraan positif.

E. TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan ini secara umum adalah menempatkan studi tentang pewacauan kembali *welfare state* yang telah direkonstruksi sebagai sebuah alternatif bagi sistem ekonomi di era neoliberal dimana kekuasaan TNCs dan MNCs akan menggerus rakyat di dunia ketiga ketika negara tidak memiliki kekuasaan meregulasi aktivitas ekonomi yang menyebabkan terjadinya anarki kapitalisme akibat logika "*laissez faire*".

Secara khusus penulisan ini bertujuan untuk; *pertama*, meneliti secara lebih mendalam kedudukan negara-negara dunia ketiga dalam percaturan ekonomi politik dunia di era neoliberal. *Kedua*, ketertarikan penulis atas mengemukakan wacana anti-globalisasi dan pendukung globalisasi dalam studi kritis ekonomi politik internasional. *Ketiga*, sebagai media pengaplikasian teori berkaitan dengan kasus yang diangkat. *Keempat*, sebagai sarana pemecahan masalah dan pembuktian hipotesa yang telah diajukan.

F. JANGKAUAN PENULISAN

Demi menghindari adanya pembahasan yang terlalu luas maka skripsi ini akan memfokuskan diri pada pembahasan dalam kisaran penerapan sistem *welfare state* pada awal abad 20, setelah adanya

malaise akibat penerapan kapitalisme *laissez faire*, hingga perkembangan kapitalisme kontemporer yang sering disebut neoliberalisme dan pengaruhnya terhadap negara-negara dunia ketiga hingga munculnya sebuah kesadaran yang oleh Jhon Perkins disebut sebagai kesadaran terjajah dari mereka dan akhirnya menggunakan bentuk "welfare state" atau kapitalisme negara agar bisa tetap mengamankan rakyatnya dari keganasan kapitalisme neoliberal yang telah mengalami mondialisasi.

G. METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan bentuk studi pustaka, dengan menggunakan metode kualitatif sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder yang didapatkan dari buku-buku literatur, surat kabar, makalah ilmiah, jurnal, majalah dan situs-situs internet dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan.

Standar penulisan yang digunakan adalah standar penulisan ilmiah dengan tambahan data kuantitatif berupa tabel atau grafik perkembangan apabila diperlukan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas penulisan dan sarana pembuktian hipotesa namun tetap menjaga keaslian tulisan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebagai unsur penyempurna yang paling penting dalam penulisan karya ilmiah, disamping hal-hal yang telah penulis sebutkan